

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Astuti Hary (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) pada Daerah Aliran Sungai Brantas Hulu”. Dalam penelitiannya Untuk mengetahui apakah implementasi IWRM atau Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) di DAS Brantas Hulu sudah memadai, peneliti melakukan survey dan pengkajian untuk mengidentifikasi IWRM yang tepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa isu-isu pokok yang sedang dialami oleh DAS Brantas Hulu adalah alih fungsi tata guna lahan sepanjang DAS Brantas Hulu, penurunan kuantitas dan kualitas air di aliran Kali Brantas Hulu serta degradasi lahan; implementasi PSDAT di DAS Brantas Hulu telah dilaksanakan oleh kerja sama beberapa pihak melalui beberapa gerakan terpadu seperti pertemuan beberapa stakeholder, GNKPA dan pemberdayaan masyarakat ;masalah-masalah yang perlu diidentifikasi dalam penerapan IWRM adalah pemberian izin alih guna lahan, sebagian besar mata pencaharian penduduk berupa bercocok tanam dengan membuka hutan serta potensi kerusakan di daerah DAS Brantas Tengah dan Hilir; IWRM/PSDAT masih dikatakan layak untuk diimplementasikan di DAS Brantas Hulu terlihat dari progress beberapa gerakan PSDAT yang telah berjalan.

Penelitian Taqwa (2018) tentang “Konsep Model *Integrated Water Resource Management* Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Komunitas” memiliki tujuan untuk melakukan pendekatan konsep IWRM untuk menyelesaikan permasalahan penyediaan air bersih bagi setiap institusi yang menggunakan air bersih. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan membandingkan faktor – faktor yang berpengaruh pada Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) baik yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum maupun yang dilaksanakan oleh komunitas sejak perencanaan, konstruksi hingga masa operasional dan pemeliharaan. Pada penelitian ini, peneliti membandingkan komponen SPAM antara PDAM dan komunitas, jenis infrastruktur terbangun, peranan *stakeholder* SPAM komunitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen

pada SPAM berbasis komunitas belum berjalan dengan baik sehingga dikhawatirkan infrastruktur yang telah terbangun menjadi terbengkalai dan tidak berfungsi dengan baik.

Penelitian yang berjudul “Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah” oleh Jenahu et al. (2023) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. menganalisis peran dan kontribusi pemerintah daerah kabupaten klaten dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya air di daerahnya berdasarkan fakta di lapangan dan peraturan daerah yang mengatur hal-hal tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang artinya permasalahan yang diambil, diteliti dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dikerjakan dengan meninjau berbagai macam aturan-aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang serta literatur - literatur yang bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi sebuah pokok pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menjalankan perannya dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012.

Irwadi et al. (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Penguatan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Studi Kasus : DPS Logawa, Kabupaten Banyumas”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pengumpulan data yang luas dan banyak mengenai pengelolaan DAS hasil Diskusi FGD Pemangku Kepentingan, sedangkan evaluasi kebijakan pengelolaan DAS

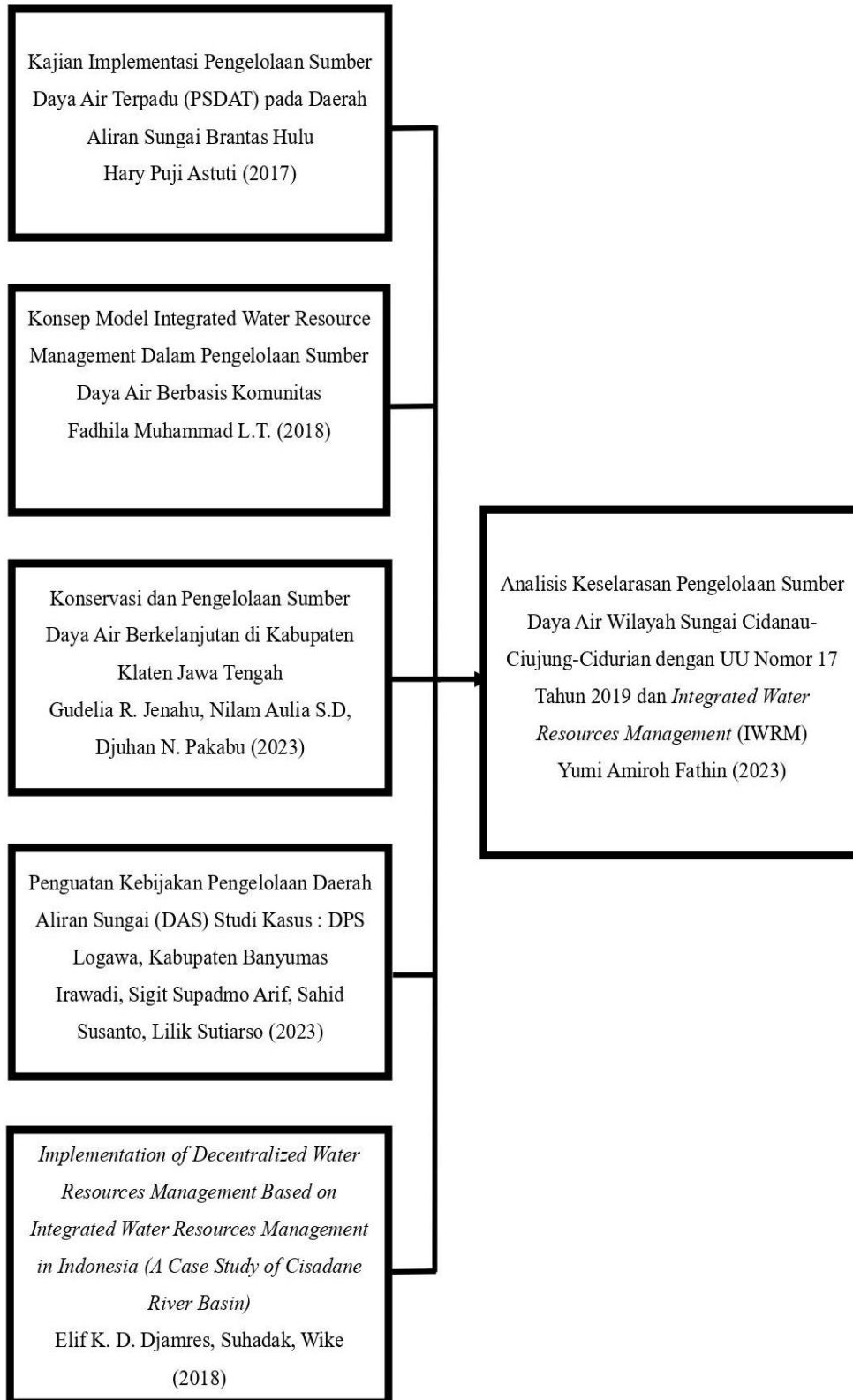
dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat).

Hasil penelitian yang didapatkan adalah kebijakan Pengelolaan DAS secara terpadu dan berkelanjutan perlu dikuatkan melalui :

- a. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan DAS;
- b. Mewujudkan pembentukan Forum DAS dan komitmen bersama antar stakeholders;
- c. Mewujudkan adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan DAS dan
- d. Mewujudkan Pemahaman Bersama tentang Pengelolaan DAS.

“Implementation of Decentralized Water Resources Management Based on Integrated Water Resources Management in Indonesia (A Case Study of Cisadane River Basin)” adalah penelitian yang dilakukan oleh Djamres et al. (2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk investigasi implementasi pengelolaan sumber daya air yang terdesentralisasi berdasarkan prinsip “Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu” di wilayah sungai Cisadane serta menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan paradigma pengelolaan sumber daya air terpadu dengan terjun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber data seperti mewawancarai informan, gambar, atau data dokumentasi lainnya sebagai pedoman untuk menggambarkan hasil penelitian. penerapan desentralisasi pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip IWRM di wilayah sungai Cisadane telah berjalan dengan baik. Namun demikian, beberapa permasalahan terkait komunikasi antar pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya merupakan permasalahan utama desentralisasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia dan dapat menghambat kebijakan untuk mencapai tujuannya.

2.2 Keterkaitan Penelitian



Gambar 2. 1 Flowchart Keterkaitan Penelitian Terhadap Penelitian Terdahulu
(Sumber : Analisis Penulis, 2024)

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hary Puji Astuti (2017)	Kajian Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) pada Daerah Aliran Sungai Brantas Hulu	Untuk mengetahui apakah implementasi <i>Integrated Water IWRM</i> atau Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) di DAS Brantas Hulu sudah memadai	Penelitian ini dilakukan dengan survei dan pengkajian untuk mengidentifikasi IWRM yang tepat	Terdapat masalah seperti alih fungsi lahan, penurunan jumlah air, kualitas air di aliran Kali Brantas Hulu, dan kerusakan lahan. PSDAT telah diterapkan melalui kerja sama seperti pertemuan stakeholder, GNKPA, dan pemberdayaan masyarakat. Masalah saat menerapkan IWRM/PSDAT adalah pemberian izin alih guna lahan,.
2	Fadhila Muhammad L.T. (2018)	Konsep Model <i>Integrated Water Resource Management</i> dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Komunitas	Melakukan pendekatan konsep IWRM untuk menyelesaikan permasalahan penyediaan air bersih bagi setiap institusi yang menggunakan air bersih	Membandingkan variabel yang mempengaruhi Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) tahap perencanaan, masa operasional dan pemeliharaan.	Penerapan sistem manajemen pada SPAM berbasis komunitas belum berjalan dengan baik sehingga dikhawatirkan infrastruktur yang telah terbangun menjadi terbengkalai dan tidak berfungsi dengan baik.
3	Gudelia R. Jenahu, Nilam Aulia S.D, Djuhan N. Pakabu (2023)	Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah	Mengetahui bagaimana konservasi dan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Mempertimbangkan peran dan kontribusi pemerintah daerah kabupaten klaten dalam	Penelitian yuridis normatif memeriksa berbagai macam aturan hukum formal, seperti Undang-Undang, dan penelitian teoritis yang kemudian dihubungkan dengan topik penelitian.	Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Klaten menjalankan perannya dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

			melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya air di daerahnya		42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
4	Irawadi, Sigit Supadmo Arif, Sahid Susanto, Lilik Sutiarto (2023)	Penguatan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Studi Kasus : DPS Logawa, Kabupaten Banyumas	Menguatkan kebijakan pengelolaan DAS, mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan DAS, meningkatkan kualitas hasil pengelolaan DAS dan untuk mengetahui alternatif pengelolaan lahan yang diterapkan di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS).	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pengumpulan data yang luas mengenai pengelolaan DAS hasil Diskusi FGD Pemangku Kepentingan. Evaluasi kebijakan pengelolaan DAS dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.	Kebijakan Pengelolaan DAS terpadu dan berkelanjutan membentuk harmonisasi, sinkronisasi peraturan, pembentukan Forum DAS, komitmen, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, dan pemahaman bersama.
5	Elif K. D. Djamres, Suhadak, Wike (2018)	Implementation of Decentralized Water Resources Management Based on Integrated Water Resources Management in Indonesia (A Case Study of Cisadane River Basin)	Investigasi implementasi pengelolaan sumber daya air yang terdesentralisasi berdasarkan prinsip “Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu” di wilayah sungai Cisadane serta menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.	Penelitian deskriptif studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan mengeksplorasi penerapan paradigma dengan langsung ke lokasi di lapangan. Pengumpulkan sumber data dengan wawancara informan, gambar, atau data dokumentasi lainnya.	Penerapan desentralisasi berdasarkan prinsip IWRM di Wilayah Sungai Cisadane telah berjalan dengan baik. Terdapat beberapa permasalahan terkait komunikasi antar pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat kebijakan untuk mencapai tujuannya.

(Sumber : Analisis Penulis, 2024)